



BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA KERJA TAHUN 2024

**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA**

Jalan Merdeka No. 2 Kebumen Telp (0287) 384264,
381144-381410 Fax (0287) 381423
KEBUMEN



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,


* AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (SOTK PD dan Tupoksi)

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja PD Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

C. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD Memuat kajian/review terhadap:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2022) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJIP
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.
3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 pada Permendagri 86/2017 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1		Urusan								
1	01	Bidang/Urusan								
1	01	Program								
1	01	01	Kegiatan							
1	01	01	02	Kegiatan						
1	01	01	03	Det						
1	01	02	Program							
1	01	02	01	Kegiatan						
1	01	02	02	Kegiatan						
1	01	02	03	Det						
1	01	03	Program							
1	01	03	01	Kegiatan						
1	01	03	02	Kegiatan						
1	01	03	03	Det						

....., 20....
Kepala Perangkat Daerah *)

B. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan:

1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, dan/atau
2. Indikator Kinerja Kunci (diambil dari IKU Daerah dan IKU PD)
3. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh PD (opsional bagi PD yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi RKPD Tahun 2024)

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 Permendagri 86/2017 sebagai berikut:

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs;

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Perbandingan antara rancangan awal Renja PD dengan hasil analisis kebutuhan (penetapan RKPD); dengan menyajikan tabel T-C.31 Permendagri 86/2017 sebagai berikut

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja PD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renja PD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada PD Kabupaten (diambil dari hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum PD, usulan DAPAT dan usulan Pokir DPRD)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD (misal Disdukcapil tentang SIAK, dsb)

B. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

C. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian IKU Daerah),
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian SPM,
 - Pencapaian IKU Perangkat Daerah
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan kewilayahan,
 - Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja PD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 serta prakiraan maju tahun 2025 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

SUSUNAN TIM VERIFIKASI
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024

NO.	OPD	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	SEKRETARIS BAPPEDA	BAHRUN MUNAWIR, S.STP, M.Si.	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	PERENCANA AHLI MADYA SEBAGAI SUBKOR INFRASTRUKTUR	BUDI JATMIKO, S.Pd, M.Pd.
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	PERENCANA AHLI MADYA SEBAGAI SUBKOR INFRASTRUKTUR	BUDI JATMIKO, S.Pd, M.Pd.
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.

NO.	OPD	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
				PEMBANGUNAN DAERAH	
8	DINAS TENAGA KERJA	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEREKONOMIAN	DYAH MUSTIKA P, ST, M.Ling
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR SUMBER DAYA ALAM	EKA YULIANTO SE, ME
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR SUMBER DAYA ALAM	EKA YULIANTO SE, ME
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	PERENCANA AHLI MADYA SEBAGAI SUBKOR INFRASTRUKTUR	BUDI JATMIKO, S.Pd, M.Pd.
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEREKONOMIAN	DYAH MUSTIKA P, ST, M.Ling
15	DINAS PENANAMAN MODAL PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR SUMBER DAYA ALAM	EKA YULIANTO SE, ME

NO.	OPD	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEREKONOMIAN	DYAH MUSTIKA P, ST, M.Ling
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA	IIN LATIFAH, ST
18	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS BAPPEDA	BAHRUN MUNAWIR, S.STP, M.Si.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP
19	SEEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIS BAPPEDA	BAHRUN MUNAWIR, S.STP, M.Si.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP
20	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP
23	INSPEKTORAT	SEKRETARIS BAPPEDA	BAHRUN MUNAWIR, S.STP, M.Si.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP

NO.	OPD	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc

TIM VERIFIKASI RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
1.	AYAH	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
2.	BUAYAN	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
3.	PURING	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
4.	PETANAHAN	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc

NO.	KECAMATAN	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
5.	KLIRONG	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
6.	BULUSPESANTREN	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
7.	AMBAL	KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng.	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
8.	MIRIT	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA	IIN LATIFAH, ST
9.	BONOROWO	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA	IIN LATIFAH, ST
10.	PREMBUN	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA	IIN LATIFAH, ST
11.	PADURESO	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA	IIN LATIFAH, ST
12.	KUTOWINANGUN	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	TAUKHID, SE	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc

NO.	KECAMATAN	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
13.	ALIAN	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	TAUKHID, SE	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
14.	PONCOWARNO	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	TAUKHID, SE	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
15.	KEBUMEN	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	TAUKHID, SE	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
16.	PEJAGOAN	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
17.	SRUWENG	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
18.	ADIMULYO	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
19.	KUWARASAN	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PENGENDALIAN, EVALUASI, DATA DAN INFORMASI	UMI YULIASTUTI, S.STP, M.Si	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
20.	ROWOKELE	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PENGENDALIAN,	UMI YULIASTUTI, S.STP, M.Si	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc

NO.	KECAMATAN	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR	JABATAN VERIFIKATOR	NAMA VERIFIKATOR
		EVALUASI, DATA DAN INFORMASI		MASYARAKAT	
21.	SEMPOR	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PENGENDALIAN, EVALUASI, DATA DAN INFORMASI	UMI YULIASTUTI, S.STP, M.Si	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
22.	GOMBONG	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PENGENDALIAN, EVALUASI, DATA DAN INFORMASI	UMI YULIASTUTI, S.STP, M.Si	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
23.	KARANGANYAR	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	AGUS SETYAWAN, SE, ME	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc
24.	KARANGGAYAM	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMERINTAHAN	HANTARI MAHADEWI, SP
25.	SADANG	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	TAUKHID, SE
26.	KARANGSAMBUNG	PERENCANA AHLI MUDA SEBAGAI SUBKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	CAHYO RIYADI, S.Hut, M.Ap, M.Agr.Sc	ANALIS PERENCANA SEBAGAI SUBKOR PEMBANGUNAN MANUSIA	IIN LATIFAH, ST

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Buku ini berisi prioritas program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen 2021-2026 serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen pada tahun 2022.

Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh pemangku kepentingan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Tentu saja buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan guna perbaikan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah di tahun yang akan datang.

Semoga buku rencana kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen.

Kebumen, Juli 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN**

H. MOH. AMIRUDIN, S.IP,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 196804241998031011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Landasan Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	9
A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9
B. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
C. Analisis Capaian Keuangan	19
D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
E. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kegiatan Perangkat Daerah	25
F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	37
B. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	38
C. Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
A. Prioritas BKPSDM yang Mendukung Prioritas Kabupaten	43
B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	45
BAB V PENUTUP	51
A. Kaidah-kaidah Pelaksanaan..	51
B. Rencana Tindak Lanjut	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2022	9
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kebumen	11
Tabel 2.3. Ketercapaian Program BKPSDM terhadap RENSTRA s/d Tahun 2022	16
Tabel 2.4. Capaian Kinerja IKU BKPSDM Tahun 2022	16
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	18
Tabel 2.6. Alokasi Anggaran BKPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022	19
Tabel 2.7. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kebumen	26
Tabel 2.8. Rekapitulasi Anggaran Program BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024	36
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	39
Tabel 4.1. Prioritas BKPSDM yang Mendukung Prioritas Kabupaten	43
Tabel 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) untuk periode 1 (satu) Tahun.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan fungsi yang diemban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen meliputi :

1. penyusunan rencana dan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

5. pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
7. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
8. pelaksanaan administrasi Badan; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 merupakan:

1. Pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1984);

23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen;
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 disusun dengan sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang.
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud Dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II. Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penjelasan tentang uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- A. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024
- B. Prakiraan maju tahun 2025 Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

- A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- B. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- C. Rencana Tindak Lanjut.

LAMPIRAN :

1. Berita Acara Forum Perangkat Daerah 2024 beserta lampirannya;
2. Daftar Hadir Forum Perangkat Daerah 2024;
3. Notulen Forum Perangkat Daerah 2024

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Tahun 2022 diperlukan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahun 2024.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah, Tahun 2022 BKPSDM menjalankan 3 Program dan 12 Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan BKPSDM
Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	Program	No.	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Kepegawaian Daerah	7	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		8	Mutasi dan Promosi ASN
		9	Pengembangan Kompetensi ASN
		10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	Pengembangan Kompetensi Teknis
		12	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (2022) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (2022), mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen sampai dengan Tahun 2022 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 tercermin dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kebumen

Kode/ Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPSDM Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluasan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja BKPSDM Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja BKPSDM Tahun 2022	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jumlah Prosentase capaian seluruh program /jumlah program	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD	100%	100%	100%					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	60,86	60,86	60,86	100%	100%	100
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah	46 dok	0	10 dok	10 dok	100	8 dok	18 dok	39,13
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	12 bln	0	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum BKPPD	60 bln	0	6 bln	2 bln	33,33	6 bln	8 bln	13,33
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum BKPPD	65 unit	0	1 unit	1 unit	100	4 unit	5 unit	7,70
5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum BKPPD	12 bln	0	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	20
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum BKPPD	118 unit	0	50 unit	50 unit	100	21 unit	71 unit	60,17
2	Program Kepegawaian Daerah	Terfasilitasinya aparatur pemerintah sejak perekrutan, penempatan pengembangan karir sampai dengan penghargaan prestasi	93,99 %	0	90%	94,83%	105,37	91 %	100 %	100
7	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kebutuhan formasi ASN, penataran pengangkatan dan pemberhentian ASN	3 keg	0	3 keg	2 keg	66,67%	3 keg	3 keg	100
8	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kebutuhan formasi ASN, penataan, pengangkatan dan pemberhentian ASN	2 keg	0	2 keg	2 keg	100	2 keg	2 keg	100
9	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	2 ASN	0	2	2	100	2	2	100

Kode/ Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPSDM Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja BKPSDM Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja BKPSDM Tahun 2022	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 0	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Program pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah aparatur yang tidak dijamah hukuman disiplin Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	2 keg	0	2	2	100	2 keg	2 keg	100
3			77,21%	0	70,04%	76,26	108,89	72,08	76,26	98,77
1 1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pejabat yang mengikuti bimtek	78	0	6	6	100	14	20	25,64
1 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah aparatur yang meningkatkan kompetensinya	29	0	5	5	100	5	10	34,48

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Tabel 2.5 diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan target kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis 2021-2026. Adapun mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 telah mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan terdapat program dan kegiatan yang dilanjutkan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026

B. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 melaksanakan 3 program. Adapun analisa realisasi Rencana Kerja sebagai berikut :

1. **Indikator Kinerja sasaran 1** “Penempatan PNS dalam jabatan“ dicapai melalui 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan, 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, yaitu: Program Kepegawaian Daerah, dengan 9 (sembilan) indikator kinerja outcome:
 - a. Persentase Jumlah Kegiatan Pengadaan ASN. Dari 7 kegiatan tercapai sebanyak 7 kegiatan,. Nilai aspek perencanaan kebutuhan, tercapai 100%.
 - b. Persentase Jumlah Dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN, tercapai 116%.
 - c. Jumlah Dokumen Pemutakhiran ASN tercapai 100% sebanyak 2 dokumen.
 - d. Nilai aspek promosi dan mutasi, tercapai 100% Karena telah diterbitkan kebijakan tentang: Pola karir, mutasi, rotasi dan promosi secara objektif dan transparan, serta pelaksanaan kebijakan pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif.
 - e. Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan Lanjutan ASN, tercapai 76% karena Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Lanjutan tergantung usulan dari OPD.
 - f. Jumlah Dokumen SK Jabatan Fungsional, tercapai 185%.
 - g. Jumlah jenis dokumen evaluasi Kinerja, tercapai 100%.
 - h. Jumlah jenis dokumen hasil penilaian evaluasi Kinerja Aparatur, tercapai 100%.

Program Kepegawaian Daerah didukung oleh kegiatan berikut:

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan:
 - 1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, dengan output:
 - Jumlah dokumen peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK, tercapai 100%.
 - Jumlah dokumen data kepegawaian secara lengkap dan real time yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi, tercapai 100%

- Jumlah dokumen data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, tercapai 100%.
 - Jumlah dokumen rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun yang berasal dari CPNS, PPPK ataupun PNS dari instansi lain, tercapai 100%.
- 1.2 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, dengan output:
- Jumlah PNS yang difasilitasi dalam pengurusan Pensiun dan Taspen, tercapai 116%. Dari target 600 orang, terealisasi 701 orang.
- 1.3 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan output:
- Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai, tercapai 100%.
2. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan:
- 2.1 Pengelolaan Mutasi ASN, dengan output:
- Jumlah pegawai baru yang diangkat menjadi PNS yang penempatan pertamanya sesuai jabatan yang dilamar, tercapai 95%. Tertundanya proses seleksi CPNS formasi Tahun 2021 sehingga tahapan pemberkasan dan pengajuan penerbitan NIP baru dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2022.
 - Jumlah ASN yang di mutasi, rotasi dan promosi secara obyektif dan transparan, tercapai 276%. Didukung adanya peralihan jabatan struktural menjadi fungsional.
- 2.2 Pengelolaan Promosi ASN, dengan output:
- Jumlah pelaksanaan pengisian JPT, secara terbuka dan kompetitif, tercapai 100%.
 - Jumlah pejabat struktural yang mengikuti uji kompetensi, tercapai 100%. Untuk penyelenggaraan seleksi terbuka JPT yang rencananya dilaksanakan 2 tahap sudah terlaksana sesuai dengan target.
3. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan:
- 3.1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, dengan output:
- Jumlah ASN yang memperoleh bantuan tugas belajar, tercapai 76%.
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan:
- 4.1 Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan output:
- Jumlah PNS yang difasilitasi penilaian kerjanya, tercapai 100%.
- 4.2 Jumlah Jenis Dokumen Hasil penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur, dengan output:
- Jumlah penanganan penegakan kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya, tercapai 100%.

- Terlaksananya pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai, tercapai 100%.

2. Indikator Kinerja sasaran 2 yaitu “Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural” dicapai melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, yaitu: Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan 2 (dua) indikator kinerja outcome:

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia didukung oleh kegiatan berikut:

1. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan:
 - 1.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan output:
 - Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (diklat teknis dan fungsional), dengan jumlah peserta 135 orang, tercapai 100%
2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan:
 - 2.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, dengan output:
 - Orientasi PPPK Jumlah peserta 1932 orang tercapai 100%.
 - Penyelenggaraan PKA/Diklatpim III bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Jateng dan Yogyakarta, serta PPSDM Kemendagri Yogyakarta dengan peserta 4 orang;
 - Pengiriman peserta PKP/diklatpim IV secara banded sebanyak 7 orang peserta.

4. **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang**

Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Capaian Indikator kegiatan untuk mendukung pencapaian program secara umum telah terealisasi sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Tabel 2.3
Ketercapaian Program BKPSDM terhadap RENSTRA
s/d. Tahun 2022

1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	99%
2	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	71,34%
Rata-rata			85,17%

Berdasarkan Tabel 2.3 Capaian Renstra BKPSDM sampai Tahun 2022 diperkirakan indikator program hanya dapat dilaksanakan 106% karena adanya beberapa kegiatan yang lebih sederhana karena adanya penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Program penempatan PNS dalam jabatan dalam renstra ditargetkan 90 orang dan dapat dilaksanakan 110%. Program pejabat struktural ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebesar 70,04% dan dapat dilaksanakan 102%.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja IKU BKPSDM Tahun 2022

No.	IKU BKPSDM	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Tingkat Capaian 2022 (%)	Predikat Capaian 2022
	Indikator tujuan					
	Indeks Kepuasan Masyarakat		83,00	87,69	105,65	Berhasil
	Indikator sasaran (Urusan Kepegawaian)					
1.	Presentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	90	99	110	Berhasil
2.	Presentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	70,04	71,34	102	Berhasil

Berdasarkan Tabel 2.4 bahwa realisasi kinerja IKU 1 BKPSDM yaitu presentasi penempatan PNS dalam jabatan tahun 2022 lebih tinggi 9% dibanding target yang direncanakan yaitu 90% sedangkan capaian sebesar 110% diperoleh dari jumlah PNS yang telah mendapatkan jabatan yang sesuai / jumlah total PNS x 100% (11.843/11.746) x 100% = 99%. Sedangkan realisasi kinerja IKU 2 BKPSDM persentase pejabat struktural ASN yang telah

mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2022 lebih tinggi 1,3% dibanding target yang direncanakan yaitu 70,04% sedangkan capaian sebesar 102% diperoleh dari jumlah jabatan yang mengikuti diklat struktural kepemimpinan / jumlah seluruh jabatan yang terisi x 100% $(371/520) \times 100\% = 71,34\%$. (* JPT, jabatan administrator dan jabatan pengawas).

Dari kedua indikator tersebut, selanjutnya dijumlah dan kemudian diambil rata-rata sehingga menghasilkan realisasi kinerja sebesar 106%. Untuk capaian kinerja presentasi penempatan PNS dalam jabatan sebesar 101% diperoleh dari realisasi dibagi target dikalikan 100% $(99/90) \times 100\% = 101\%$. Untuk capaian kinerja persentase pejabat struktural ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebesar 102% diperoleh dari realisasi dibagi target dikalikan 100% $(71,34/70,04) \times 100\% = 102\%$. Hal tersebut dikarenakan aspek pengadaan CPNS terlaksana dengan penempatan CPNS pengadaan formasi 2022 sebanyak 95 orang, pengangkatan Guru PPPK Tahun 2022 Tahap I sebanyak 1310 orang, pengangkatan Guru PPPK Tahap II sebanyak 597 orang, aspek promosi dan mutasi dari semua aspek tersebut, penempatannya sudah sesuai dengan jabatannya. Indikator selanjutnya Persentase Pejabat Struktural ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural tercapai dengan melakukan optimalisasi fasilitasi pengembangan kompetensi pegawai di pasca masa pandemi dengan tetap mengikutsertakan ASN dalam pelatihan secara *streaming* menggunakan media online zoom.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kepegawaian, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, pengelolaan administrasi tata kepegawaian, serta menyiapkan susunan program pendidikan dan pelatihan usaha aparatur kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur/PNS serta latihan prajabatan.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen

No	Indikator	IKK	Target Renstra Setda				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83,00	84,00	85,00	85,50	86,48	88,78	85,00	85,50		
2.	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan		90,00	91,00	92,00	93,00	99,18	99,92	92,00	93,00		
3.	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural		70,04	72,08	73,18	75,09	71,35	67,26	73,18	75,09		

Berdasarkan data Tabel 2.5 di atas merupakan hasil evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dengan pencapaian kinerja yang dinilai adalah tahun n-2 dan n-1 dari tahun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yaitu Tahun 2022 dan 2023. Capaian di Tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Penempatan PNS dalam jabatan di atas target yang telah ditentukan, namun untuk Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural capaiannya masih di bawah target yang ditetapkan.

C. Analisis Capaian Keuangan

Realisasi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen pada Akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp.9.679.902.015,- atau sebesar 93,31% dari total anggaran sebesar Rp.10.373.443.000,-. Dengan capaian penyerapan 93,31%, sedangkan rincian realisasi per jenis belanja tersaji sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2022

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN 2022	REALISASI 2022	%
	Total Belanja	10.373.443.000	9.679.902.015	93,31
A.	Belanja Kepegawaian	1.394.750.000	1.156.207.952	82,90
B.	Belanja Pengembangan SDM	2.449.000.000	2.425.275.530	99,04
C.	Belanja Penunjang	6.529.693.000	6.098.418.533	93,75

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa realisasi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan sasaran Tahun 2022. Anggaran Rp. 10.373.443.000 di Tahun 2022. sedangkan capaian realisasi penyerapan anggaran 93,31%. Penyebab pengurangan anggaran di Tahun 2022 adalah karena adanya penyesuaian anggaran dari dana alokasi umum pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten.

D.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, maka kedudukan, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen, adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam mengimplementasikan tugas pokok tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- h. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masalah-masalah yang dihadapi selama lima tahun lalu berdasarkan tugas dan fungsi pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen diantaranya adalah :

1. Jumlah PNS belum sesuai dengan kebutuhan Formasi Tahun 2021 s.d 2026.
2. Indeks Profesionalisme pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 masih rendah yaitu 65,69%.
3. Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dengan SIMPEG Kabupaten Kebumen belum dilaksanakan.
4. Pengembangan Kompetensi PNS minimal 20 JP setahun masih rendah, berdasarkan data SIMPEG kabupaten Kebumen sebesar 20%.
5. Belum disusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai.
6. Belum tersusun Manajemen Pola Karir ASN sesuai amanat dari Kementrian Dalam Negeri

Permasalahan pelayanan BKPSDM Kabupaten Kebumen dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor Internal yang mempengaruhi pelayanan BKPSDM yaitu :

1. Peta jabatan belum berdasarkan kebutuhan real perangkat daerah.
2. *Pemutakhiran* database SIMPEG belum optimal.
3. Monitoring dan Evaluasi Penegakkan Disiplin belum secara optimal dilaksanakan

Faktor eksternal yang mempengaruhi pelayanan BKPSDM yaitu :

1. APBD Kabupaten Kebumen untuk Belanja Pegawai masih di atas 50%. Sehingga penambahan ASN terbatas jumlahnya tidak sesuai dengan usulan Permerintah Kabupaten Kebumen ke Kemendagri melalui e-formasi.
2. Standar Kompetensi Manajerial (SKM) dan Standar Kompetensi Teknis (SKT) belum tersusun sepenuhnya

Mendasarkan faktor internal dan eksternal tersebut dapat diidentifikasi masalah-masalah pokok di bidang kepegawaian yaitu:

1. Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan.

Jawaban pemerintah dari tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pelayanan publik dapat terlihat dari bagaimana Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja secara profesional. Oleh karena itu, salah satu harapan dilaksanakannya reformasi birokrasi adalah mewujudkan sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang profesional yaitu pegawai yang mengerti akan hak dan kewajibannya, memahami tugas pokok dan fungsinya serta dapat melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki. Namun kenyataan yang ada sampai saat ini profesionalisme Pegawai Negeri Sipil masih belum dapat diwujudkan.

2. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian.

Data merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik. Begitu pula data yang berkaitan dengan kepegawaian, menjadi modal penting untuk pelayanan kepegawaian yang optimal. Proses pengolahan data dewasa ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informatika yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dalam mengaplikasikan data pegawai.

Meskipun telah tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), walaupun telah diintegrasikan dalam proses penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) namun masih perlu diintegrasikan dengan pelayanan administrasi kepegawaian seperti, SAPK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Pegawai , Kenaikan Gaji Berkala, dan administrasi kepegawaian

lainnya. Data pegawai yang lengkap dan *up to date* merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyusunan program perencanaan, peningkatan kapasitas serta pembinaan dan pengembangan karir sumber daya aparatur. Perencanaan yang dilakukan tanpa dukungan data yang lengkap dan akurat, dapat berakibat terhadap tidak sesuainya rencana yang disusun dengan kebutuhan pegawai. Untuk itu keberadaan sistem informasi manajemen kepegawaian ini perlu lebih dioptimalkan lagi, agar perencanaan dan pemberdayaan sumber daya aparatur lebih dapat ditingkatkan.

3. Peta jabatan yang disusun belum berdasarkan kebutuhan real perangkat daerah.

Dalam rangka penataan jabatan dan reformasi bidang sumber daya aparatur, perlu ditentukan peringkat jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan pegawai negeri berdasarkan nilai jabatan melalui evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan dilakukan untuk menentukan nilai jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam pemeringkatan jabatan. Hasil evaluasi jabatan berupa nilai dan peringkat jabatan ini dapat digunakan antara lain dalam penghitungan tunjangan, penempatan, dan penataan jabatan. Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. Kondisi saat ini Perangkat Daerah belum menyusun Peta jabatan sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satu isu strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026 yaitu Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Merujuk pada hal tersebut Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen mempunyai isu strategis yang dihadapi pada Tahun 2022-2026 guna mendukung isu strategis daerah tersebut, yaitu:

1. Tata kelola Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.

Manajemen ASN bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, pengelolaan manajemen ASN haruslah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tata kelola manajemen sumber daya manusia aparatur terdiri dari 18 elemen, dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan, pola karier, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, penghargaan hingga pension dan perlindungan bagi ASN. Hal ini juga untuk mendukung terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN.

2. Profesionalitas ASN.

Kualitas Pelayanan kepada masyarakat sangatlah ditunjang adanya ASN yang profesional, bermartabat dan berintegritas tinggi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat profesionalitas ASN, antara lain tingkat kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Pengembangan kompetensi menjadi faktor paling rendah, apalagi sejak masa pandemi Covid-19 ada kebijakan refocusing anggaran serta perubahan pola pembelajaran dari *classical* menjadi daring dan/ atau *blended learning*. Sehingga diperlukan inovasi dan upaya dalam peningkatan profesionalitas ASN, khususnya pengembangan kompetensi.

Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam pengembangan ASN berarti upaya untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pegawai dalam proses pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berikut upaya dalam pengembangan kompetensi:

- a. Kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;
- b. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan; dan Peningkatan kapasitas bagi semua PNS paling kurang 20 JP dalam setahun, guna meningkatkan kecakapan bekerja dan dalam upaya mendukung Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;
- d. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui *coaching* dan mentoring

3. Terintegrasi SIMPEG dengan SIASN

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah (SIMPEG) untuk mendukung program BKN, Satu Data ASN. Tujuan program layanan SIASN adalah untuk memperbaiki kualitas data ASN, khususnya menyangkut layanan manajemen kepegawaian. Melalui SIASN, setiap ASN dapat

memantau progres layanan kepegawaiannya dengan menerima notifikasi via MySAPK atau email. SIASN juga sudah menerapkan *digital signature* sehingga proses layanan pengusulan kepegawaian tidak memakan waktu yang lama dan berbasis *paperless*. Dari aspek implementasi dan pengawasan sistem merit, ada dua sasaran pembangunan SIASN, yaitu:

- a. Menginternalisasi target tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Perpres 95/2018, khususnya tentang satu data ASN atau integrasi data ASN yang dimandatkan kepada BKN.
- b. Sistem ini akan digunakan untuk fokus pada penegakan hukum dan reformasi birokrasi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sesuai Perpres 54/2018. SIASN akan dimanfaatkan untuk transparansi pengisian jabatan di lingkup instansi pusat dan daerah.

4. Pengembangan Karir PNS dan Merit Sistem

Pengembangan Karir PNS dan Merit Sistem yang ada saat ini mengacu pada Permenpan RB Nomor 22 tahun 2022, tentang Pola Karier PNS. Pola Karier yang ada memberikan kesempatan yang lebih luas dan terbuka pada PNS untuk berkarir pada jabatan lainnya yang lebih tinggi baik vertikal, horizontal dan diagonal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh PNS tersebut. Guna merespon hal tersebut BKPSDM Kabupaten Kebumen perlu menyiapkan beberapa role antara lain :

- a. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;
- b. Seleksi Terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama
- c. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi; dalam hal ini Pemetaan Kompetensi bagi PNS yang menduduki jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional, Pengawas dan Administrator agar dapat dikembangkan dan ditempatkan sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki,
- d. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
- e. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karier instansi;
- f. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
- g. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;

5. Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional dengan :

- a. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;

- b. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan; dan Peningkatan kapasitas bagi semua PNS paling kurang 20 JP dalam setahun, guna meningkatkan kecakapan bekerja dan dalam upaya mendukung Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;
- d. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring.

E. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024. Renja BKPSDM akan diimplementasikan melalui berbagai Program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya. Dokumen ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 juga memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang meliputi 1 urusan, 3 Program, 12 Kegiatan dan 31 sub kegiatan. Target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026, sehingga Renja Tahun 2024 sinkron dengan target Renstra Tahun 2024.

Review Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2024)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2024)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BKPSDM Kab. Kebumen	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13.417.404.009	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BKPSDM Kab. Kebumen	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13.417.404.009	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		31.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		31.800.000	
1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	20,000.000	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 dokumen	20,000.000	Sesuai
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat	2 Laporan	11,800.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	11,800.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2024)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2024)					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
			daerah yang tersusun.									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	200 orang	12.876.233.009	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	200 orang	12.876.233.009		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah orang ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	200 orang	12,856,233,009	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	200 orang	12,856,233,009	Sesuai	
4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	20,000,000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	12 dokumen	20,000,000	Sesuai	
	Administrasi umum perangkat daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	134.216.000	Administrasi umum perangkat daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	134.216.000	Sesuai	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	4 paket	4.120.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	4.120.000	Sesuai	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2024)				Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2024)				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 paket	19.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket bahan logistik kantor	12 paket	19.000.000	Sesuai
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 paket	30.096.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	30.096.000	Sesuai
8	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24 dokumen	3.500.000	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen	3.500.000	Sesuai
9	Penyediaan bahan/material	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	12 paket	22.000.000	Penyediaan bahan/material	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 paket	22.000.000	Sesuai
10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	52.500.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 laporan	52.500.000	Sesuai
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penataan arsip dinamis	12 dokumen	3.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	3.000.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2024)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2024)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan	2 unit	50.000.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan		50.000.000	Sesuai
12	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 unit	26.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 unit	26.000.000	Sesuai
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	6 unit	24.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	6 unit	24.000.000	Sesuai
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		165.155.000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		165.155.000	Sesuai
14	Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.000.000	Sesuai
15	Penyediaan jasa komunikasi,	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,	12 bulan	153.155.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyediaan jasa	12 bulan	153.155.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2024)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2024)					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
	sumber daya air dan listrik		sumber daya air dan listrik					komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				
16	Penyediaan jasa pelayanan umum	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum	12 bulan	10,000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	10,000.000	Sesuai	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		160.000.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		160.000.000	Sesuai	
17	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	32 unit	110.000.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	32 unit	110.000.000	Sesuai	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2024)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2024)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
18	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	22 unit	35.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	22 unit	35.000.000	Sesuai
19	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara dan rehabilitasi	1 unit	15.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	15.000.000	Sesuai
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM Kab. Kebumen	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan		1.675.000.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM Kab. Kebumen	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan		1.675.000.000	Sesuai
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		958.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		958.000.000	Sesuai
20	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah kegiatan Pengadaan ASN	3 kegiatan	690.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 kegiatan	690.000.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2024)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2024)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
21	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen pemberhentian ASN	628 dokumen	215.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	628 dokumen	215.000.000	
22	Pengelolaan sistem kepegawaian	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen pemutakhiran data kepegawaian	2 kegiatan	53.000.000	Pengelolaan sistem kepegawaian	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	2 kegiatan	53.000.000	
	Mutasi dan Promosi ASN				525.000.000					525.000.000	
23	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah kegiatan Pengelolaan Mutasi	3 dokumen	225.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil kegiatan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana, dan mutasi ASN pemerintah daerah	3 dokumen	225.000.000	Sesuai
24	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah kegiatan pengelolaan promosi ASN	3 dokumen	300.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	3 dokumen	300.000.000	Sesuai
	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah ASN yang meningkat		67.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah ASN yang meningkat		67.000.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2024)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2024)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
25	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Kompetensinya Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Pendidikan Lanjutan	200 orang	40.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Kebumen	Kompetensinya Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	200 orang	40.000.000	Sesuai
826	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan	200 orang	27.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	200 orang	27.000.000	Sesuai
927	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		135.000.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		135.000.000	Sesuai
3028	Pelaksanaan dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan dan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	6 dokumen	65.000.000	Pelaksanaan dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan dan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	6 dokumen	65.000.000	
3028	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4 laporan	60.000.000	Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah dokumen hasil Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4 laporan	60.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2024)					Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2024)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM Kab. Kebumen	Presentase ASN yang meningkat kapasitasnya		1.736.760.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM Kab. Kebumen	Presentase ASN yang meningkat kapasitasnya		1.736.760.000	Sesuai
	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM Kab. Kebumen			300.000.000					300.000.000	
3129	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknik Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Kebumen	Penilaian dan evaluasi	268 orang	300.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	268 orang	300.000.000	Sesuai
	Sertifikat Kelembagaan Pengembangan Kompetensi, Manajerial dan fungsional	BKPSDM Kab. Kebumen			1.436.760.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BKPSDM Kab. Kebumen			1.436.760.000	Sesuai

No	Rancangan Awal RKPD (Renstra 2024)				Hasil Analisis Kebutuhan (SIPD 2024)				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
302	Penyusunan Kebijakan dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah jenis diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan daerah, Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	5 dokumen	1.436.760.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM Kab. Kebumen	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan daerah, Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	5 dokumen	1.436.760.000	Sesuai
	Total Anggaran				16.829.164.000					16.829.164.000	

Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp **16.829.164.009,-** terbagi dalam 2 urusan yaitu urusan kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan. Anggaran urusan kepegawaian sebesar Rp 1.675.000.000,- dan urusan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp 1.736.760.000,-. Bila dilihat dari program yang dilaksanakan Tahun 2024, BKPSDM memiliki 2 program. Anggaran setiap program cenderung proporsional, sedangkan anggaran terbesar program penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu anggaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 13.417.404.009,- dengan didalamnya terdapat penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Tabel 2.8

Rekapitulasi Anggaran Program BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No.	Program	Pagu Anggaran Rancangan Awal (Rp)	Pagu Anggaran Rancangan Akhir (Rp)
I	Program Kepegawaian	1.675.000.000	1.675.000.000
II	Program Penunjang	13.417.404.009	13.417.404.009
	Kesekretariatan	561.171.000	561.171.000
	Gaji 48 PNS BKPSDM + GAJI PPPK formasi 2023 152 orang + TUKIN 48 PNS BKPSDM	12.856.233.009	12.856.233.009
III	Program Pendidikan dan Pelatihan	1.736.760.000	1.736.760.000
Jumlah Total		16.829.164.009	16.829.164.009

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan kebutuhan, karena pagu pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 Kabupaten Kebumen disesuaikan dengan hasil yang telah diterima belum dilaksanakan, sehingga pagu anggaran sama dengan pagu yang ada di Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 SIPD.

F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (politik).

Tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat yang masuk dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Perangkat Daerah mengemban tugas menjamin kelancaran penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di daerah. Pada era sebelum Tahun 2015 manajemen kepegawaian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka manajemen kepegawaian mengalami perubahan yang signifikan. Menurut Undang-Undang kepegawaian yang lama manajemen Pegawai Negeri Sipil masih belum mengacu pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dikuasai calon Pegawai Negeri Sipil dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hal itu sudah tidak relevan lagi di masa sekarang ini. Manajemen Aparatur Sipil Negara yang dimaksud adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen Aparatur Sipil Negara diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manajemen Aparatur Sipil Negara ini meliputi Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.

Kebijaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara ini meliputi Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tujuan utama dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah Independensi dan Netralitas, Kompetensi, Kinerja/Produktivitas Kerja, Integritas, Kesejahteraan, Kualitas Pelayanan Publik, Pengawasan dan Akuntabilitas. Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara terdiri dari manajemen Pegawai Negeri Sipil dan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun dan tabungan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Agar tugas

tersebut berjalan efisien dan efektif diperlukan koordinasi yang baik dan lebih berkualitas dari para pemangku kebijakan baik dari unsur pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

Program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan manajemen Aparatur Sipil Negara adalah kebijakan Reformasi Birokrasi, dimana dalam salah satu area perubahan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah pada area kelima yaitu Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pada area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Tematik terdapat beberapa aspek :

1. Indeks Profesionalitas ASN
2. Indeks Sistem Merit
3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut telah dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen yang digulirkan mulai Tahun 2015 yang lalu, dimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah mengadakan internalisasi roadmap Reformasi Birokrasi tersebut dalam program dan kegiatan yang terbagi dalam beberapa tahapan kegiatan selama periode RENSTRA 2021-2026. Pada Tahun 2020, dilaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian tiap tahapan Reformasi Birokrasi yang diwujudkan dalam nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

B. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan serangkaian upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan bersama. Disitu terkandung komitmen bersama untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen yang mempunyai tujuan untuk terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang mempunyai indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Indikator Kinerja Utama Urusan yang terdiri dari prosentase penempatan PNS dalam jabatan dan persentase Pejabat Struktural dan Fungsional ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Target/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir
				2021	2022	2022	2024	2024	2025	2026	
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,97	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00	86,00
	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	%	73,06	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,99	93,99
	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	65,66	68,09	70,04	72,08	73,18	75,09	77,21	77,21

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut dan implementasi serta penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen di bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia baik aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat luas, hanya akan dapat dicapai apabila dilakukan penyusunan perencanaan strategis yang tepat dan ini merupakan renstra pertama kali yang akan dicapai di Tahun 2024.

C. Program dan Kegiatan

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 yang dirumuskan dalam program dan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 yang diwujudkan dalam Indikator Kinerja Utama Daerah
2. Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*
3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 mencakup 3 (tiga) program yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

No.	Program	No.	Kegiatan/Sub Kegiatan
I	UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN		
	KEPEGAWAIAN		
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		A1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		A2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		A3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		A4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		A5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		A6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bagian Kantor

No.	Program	No.	Kegiatan/Sub Kegiatan
		A7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		A7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		A8	Penyediaan Bahan/Material
		A9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		A10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		A12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		A13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		A14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		A15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		A16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		A17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		A18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		A19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	Program Kepegawaian Daerah	7	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		B20	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
		B21	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
		B22	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		8	Mutasi dan Promosi
		B23	Pengelolaan Mutasi ASN
		B24	Pengelolaan Promosi ASN

No.	Program	No.	Kegiatan/Sub Kegiatan
		9	Pengembangan Kompetensi ASN
		B25	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		B26	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
		10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		B27	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		B28	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	Pendidikan dan Pelatihan		
C	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	Pengembangan Kompetensi Teknis
		C29	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		12	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
		C30	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional.

Semua program dan kegiatan tersebut berlokasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dengan kelompok sasarannya adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Sedangkan pendanaan program dan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen dengan jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif program dan kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp 16.829.164.009,-.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, serta untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Selaku Perangkat Daerah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, BKPSDM mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

A. Prioritas BKPSDM Yang Mendukung Prioritas Kabupaten.

Bahwa rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas BKPSDM yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten
Tahun 2024

Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/kegiatan	Pagu	Ket
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	13.417.404.009	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.800.000	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	20.000.000	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.800.000	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.876.233.009	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.856.233.009	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	20.000.000	
5.03.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	134.216.000	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.120.000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	19.000.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.096.000	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.500.000	
5.03.01.2.06.07	Penyediaan bahan material	22.000.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	52.500.000	
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	3.000.000	

Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/kegiatan	Pagu	Ket
5.03.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50.000.000	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	26.000.000	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	24.000.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	165.155.000	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	153.155.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum	10.000.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	160.000.000	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	110.000.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	35.000.000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15.000.000	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.675.000.000	
5. 03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	958.000.000	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	690.000.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	215.000.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian	53.000.000	
5.03.02.2.0.2	Mutasi dan Promosi ASN	525.000.000	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	225.000.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	300.000.000	
5.03.02.2.0.3	Pengembangan Kompetensi ASN	67.000.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	40.000.000	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	27.000.000	
5.03.02.2.0.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	125.000.000	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	65.000.000	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60.000.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.736.760.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.736.760.000	
5.04.02.2.0.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	300.000.000	

Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/kegiatan	Pagu	Ket
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	300.000.000	
5.04.02.2.01	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.436.760.000	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	1.436.760.000	
Jumlah Total		16.829.164.009	

B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Catatan Penting		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
5														
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						15.092.404.00					12.045.715.500,00		
5	KEPEGAWAIAN						13.417.404.00					10.079.715.500,00		
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9,00					00		
5	2.01						31.800.000,00					35.200.000.000		
5	03	0	0		Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	6	6	Dokumen	20.000.000	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	22.000.000
5	03	1	1		Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun.	100%	2	2	Laporan	11.800.000	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	13.200.000
5	0	0	0											0
5	2.02													
5	03	0	0		Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	100%	200	200	orang	12,856,233,009	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	9.464.998.000
5	03	1	1		Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	100%	12	12	Dokumen	20.000.000	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25.000.000
5	0	0	0											
5	03	0	0								134.216.000,0			166.847.000,00
5	03	0	0		Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerang	100%	4	4	paket	4.120.000	Dana Transfer Umum-Dana	100%	4.224.000

5	03	0	1	2.06	0	4	Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Umum Perangkat Daerah	Semua Kelurahan	100%	12 paket	12 paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	23.523.000	
5	03	0	1	2.06	0	5	Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Umum Perangkat Daerah	Semua Kelurahan	100%	12 paket	12 paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50.000.000	
5	03	0	1	2.06	0	6	Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Umum Perangkat Daerah	Semua Kelurahan	100%	24 dokumen	24 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.850.000	
5	03	0	1	2.06	0	7	Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan bahan/ material	Umum Perangkat Daerah	Semua Kelurahan	100%	12 paket	12 paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	24.200.000	
5	03	0	1	2.06	0	9	Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Umum Perangkat Daerah	Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	12 Laporan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	57.750.000	
5	03	0	1	2.06	1	0	Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penataan arsip dinamis	Umum Perangkat Daerah	Semua Kelurahan	100%	12 dokumen	12 dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.300.000	
5	03	0	1	2.07	0	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												55.000.000,00
5	03	0	1	2.07	0	6	Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor	Umum Perangkat Daerah	Semua Kelurahan	100%	2 unit	2 unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	28.600.000	
5	03	0	1	2.07	1	0	Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Umum Perangkat Daerah	Semua Kelurahan	100%	6 unit	6 unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	26.400.000	
5	03	0	1	2.08	0	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												181.670.500,00
																		165.155.000,00	

5	03	0	1	2.08	0	1	0	1	2.08	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 laporan	12 laporan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2,200,000
5	03	0	1	2.08	0	1	0	1	2.08	0	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	12 bulan	153,155,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	168.470.500
5	03	0	1	2.08	0	1	0	1	2.08	0	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	11,000,000
5	03	0	1	2.09	0	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					160.000.000,0							176.000.000,00					
5	03	0	1	2.09	0	1	0	1	2.09	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	32 unit	32 unit	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	121,000,000
5	03	0	1	2.09	0	1	0	1	2.09	0	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	22 unit	22 unit	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	38.500.000
5	03	0	1	2.09	0	1	0	1	2.09	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 unit	1 unit	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	16,500,000
5	03	0	2				PROGRAM KEPENGAWAIAAN DAERAH					1.675.000.000,00							1.966.000.000,00					
5	03	0	2	2.01	0	2	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					958.000.000,0								1.158.000.000,0				
5	03	0	2	2.01	0	2	0	2	2.01	0	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	"Jumlah kegiatan Pengadaan ASN"	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	3 kegiatan	3 kegiatan	958.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	1.158.000.000

5	03	0	2	2.01	0	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	"Jumlah dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN"	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	600 dokumen	600 dokumen	215.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	250.000.000
5	03	0	2	2.01	1	0	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Jumlah dokumen Pemutakhiran Data Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	2	2	525.000.000,0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	580.000.000,0
5	03	0	2	2.02	Mutasi dan Promosi ASN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	03	0	2	2.02	0	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Jumlah kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	jumlah kegiatan Mutasi dan promosi yang dilaksanakan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	3	3	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	250.000.000
5	03	0	2	2.02	0	3	Pengelolaan Promosi ASN	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Jumlah kegiatan pengelolaan promosi ASN	jumlah kegiatan Mutasi dan promosi yang dilaksanakan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	5	5	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	330.000.000
5	03	0	2	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	03	0	2	2.03	0	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Pendidikan lanjutan	Jumlah ASN yang meningkatkan Kompetensinya	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	200	200	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	45.000.000
5	03	0	2	2.03	1	4	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Jumlah dokumen SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan	Jumlah ASN yang meningkatkan Kompetensinya	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	200	200	27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	45.000.000
5	03	0	2	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	03	0	2	2.04	0	2	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	6	6	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	65.000.000

	5	03	0	2	2.04	0	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Jumlah Jenis dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	4 Laporan	4 Laporan	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	90%	66,000,000	
5	04							PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								1.736.760.000,00				1.786.760.000,00	
5	04	0	2					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								1.736.760.000,00				1.786.760.000,00	
5	04	0	2	2.01				Pengembangan Kompetensi Teknis								300.000.000,00				350.000.000,00	
								Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan													
5	04	0	2	2.01	0	3		Prosentase ASN Yang meningkatkan Kapasitasnya	Prosentase ASN Yang meningkatkan Kapasitasnya	Penilaian dan Evaluasi	Prosentase kegiatan pengembangan kompetensi teknis	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	268 orang	268 orang	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase ASN Yang meningkatkan Kapasitasnya	70%	350,000,000	
5	04	0	2	2.02				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								1.436.760.000,00				1.436.760.000,00	
								Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Pimpinan dan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Prosentase ASN yang meningkatkan kapasitasnya	Jumlah jenis Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Jenis Diklat Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan dan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70%	4 jenis	4 jenis	1.436.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase ASN yang meningkatkan kapasitasnya	70%	1.436.760.000	
5	04	0	2	2.02	0	7															
								TOTAL								16.829.164.00				13.832.475.500	

BAB V

PENUTUP

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen berperan penting dan bertanggung jawab dalam peningkatan kinerja dan pembentukan sikap profesional Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen untuk mengambil kebijakan yang dapat ditindaklanjuti melalui pendekatan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka upaya-upaya peningkatan kemampuan baik kemampuan manajerial maupun kemampuan teknis dari segenap aparatur mendapatkan perhatian yang lebih mendalam.

Sejalan dengan itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 ditujukan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dalam reformasi birokrasi pelayanan publik di bidang kepegawaian.

Rencana Kerja ini berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

Memang tidak dipungkiri bahwa ketersediaan anggaran berdasarkan pagu indikatif tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024, hal tersebut karena menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

A. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah yang ditarik dari visi, misi dan program Bupati terpilih yang perlu menjadi pedoman semua pihak di jajaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah setiap tahun.
2. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Renja Kerja dan Anggaran.
3. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.

B. Rencana Tindak Lanjut.

Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dan pemangku kepentingan telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menyusun program/kegiatan Tahun 2024 dan menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, sehingga akan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur demi mewujudkan visi dan misi organisasi.

Kebumen, Juli 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN**

H. MOH. AMIRUDIN, S.IP,MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 196804241998031011

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Jl. Merdeka No : 2 Kebumen Telp. (0287) 381144 , 381410 , 384264
Faksimile (0287) 384264 e-mail kepegawaian@kebumenkab.go.id
Website <http://kepegawaian.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311

Kebumen, 16 Februari 2023

Nomor : 005/120
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Hal : Forum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun
Anggaran 2024

Kepada
Yth. 1. Asisten Administrasi Umum Sekda
Kabupaten Kebumen
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
4. Terlampir
di -
TEMPAT

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2023

Waktu : Pukul 08.30 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Setda Lt. 1

Acara : Forum Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran
2023 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024

Keterangan : Regristasi Peserta dimulai pukul 08.30 - 08.50 WIB

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN



H. MOH AMIRUDIN, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.196804241998031011

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
7.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen
8.	Camat Gombang
9.	Camat Kutowinangun
10.	Camat Prembun
11.	Camat Sruweng
12.	Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen
13.	Pejabat Struktural pada BKPSDM kabupaten Kebumen
14.	Para Sub koordinator pada BKPSDM Kabupaten Kebumen
15.	Ketua PGRI Kabupaten Kebumen
16.	LSM Bina Insani Kabupaten Kebumen
17.	Ketua Forum Anak Kebumen
18.	Bendahara Pengeluaran, Verifikator dan Pengelola Keuangan pada BKPSDM kab Kebumen
19.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Jl. Merdeka No : 2 Kebumen Telp. (0287) 381144 , 381410 , 384264
Faksimile (0287) 384264 e-mail kepegawaian@kebumenkab.go.id
Website <http://kepegawaian.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311

Kebumen, 15 Februari 2023

Nomor : 005/100
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. 1. Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kebumen
2. Seluruh Pejabat Struktural pada BKPSDM Kabupaten Kebumen
3. Seluruh Sub Koordinator pada BKPSDM Kabupaten Kebumen
4. Terlampir
di -
TEMPAT

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Februari 2023

Waktu : Pukul 14.00 - selesai

Tempat : Ruang Aula BKPSDM Kab Kebumen

Acara : Rapat Pra Forum OPD dalam rangka Penyusunan Renja Tahun 2024
BKPSDM Kab Kebumen

Keterangan : -

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN



H. MOH AMIRUDIN, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.196804241998031011

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kebumen
2.	Seluruh Pejabat Struktural pada BKPSDM Kabupaten Kebumen
3.	Seluruh Sub Koordinator pada BKPSDM Kabupaten Kebumen
4.	Bendahara Pengeluaran, Verifikator dan Pengelola Keuangan pada BKPSDM kab Kebumen
5.



PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

FORUM PERANGKAT DAERAH
BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

PENYUSUNAN RENJA BKPSDM TAHUN 2024

KEBUMEN, 20 FEBRUARI 2023

DASAR HUKUM

01

Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

02

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

03

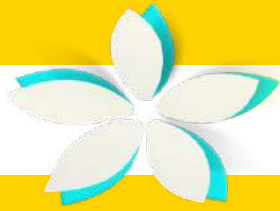
Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

04

Permendagri 70 Tahun 2019 Tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

05

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



DASAR HUKUM

06

Perda Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah

07

Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021
Tentang RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun
2021-2026.

08

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun
2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2024

09

Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 800/0255
Tanggal 25 Januari 2023 tentang Jadwal
Pelaksanaan Forum PD Tahun 2023 dan Pagu
Indikatif PD Tahun 2024



VISI

MEWUJUDKAN
KABUPATEN
KEBUMEN
SEMAKIN
SEJAHTERA,
MANDIRI,
BERAKHLAK
BERSAMA
RAKYAT

MISI



Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi

EVALUASI KINERJA BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

Kinerja Keuangan Kegiatan 2022
93,31%
(Deviasi : 6,69%)



Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan

Target
90%

Realisasi
99%



Kinerja Fisik Kegiatan 2022
100 %



Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Target
70,04 %

Realisasi
71,34%

RENCANA KERJA TAHUN 2024

**Urusan
Kepegawaian**

**Program Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota**

**6 Kegiatan,
18 Sub Kegiatan**

**Program
Kepegawaian Daerah**

**4 Kegiatan, 9 Sub
Kegiatan**

**Urusan Pendidikan
dan Pelatihan**

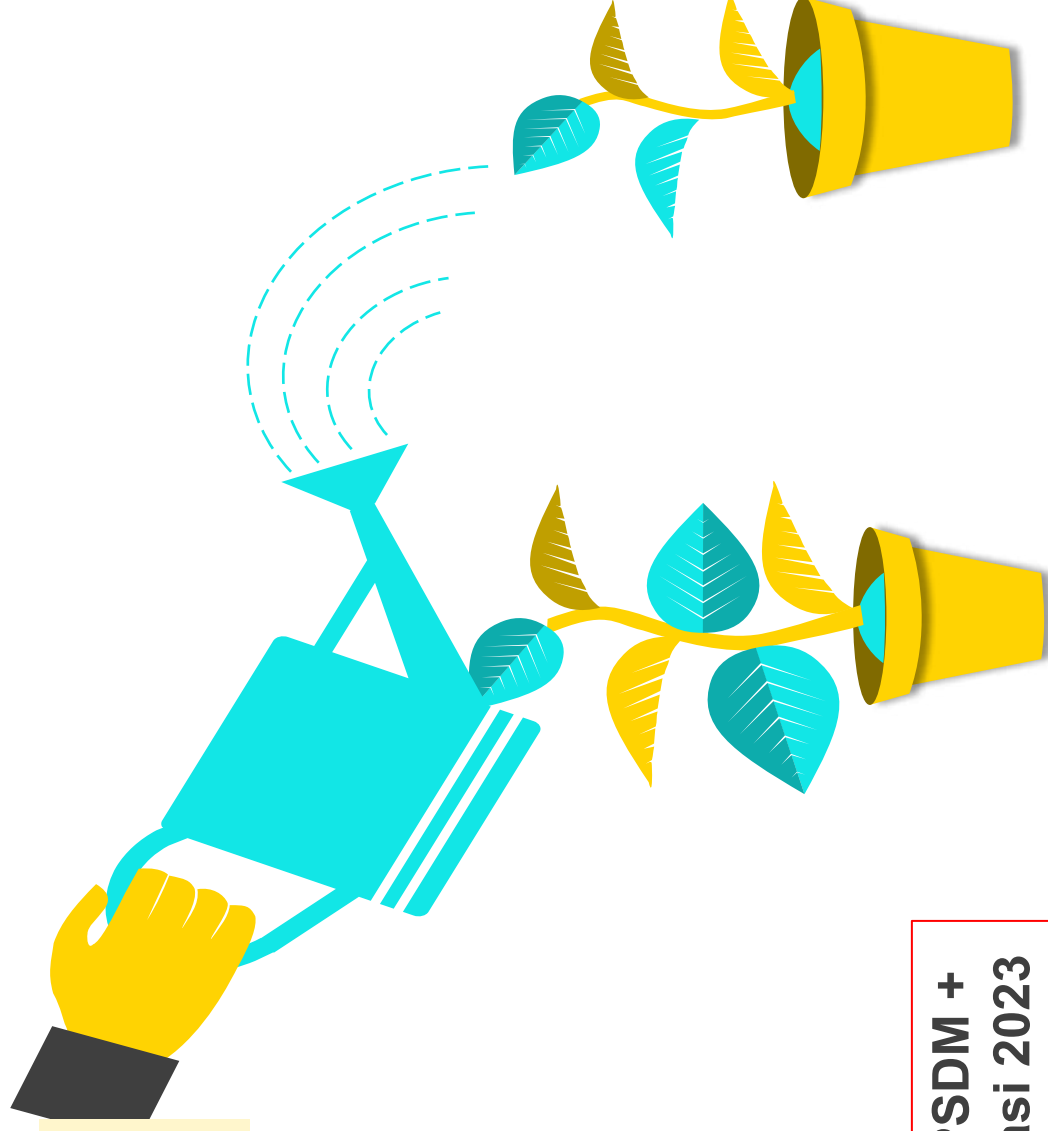
**Program Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

**2 Kegiatan, 2 Sub
Kegiatan**



PAGU INDIKATIF BKPSDM 2024

Rp. 16.829.164.009



Program Penunjang

561.171.000

Gaji 48 PNS BKPSDM +
GAJI PPPK formasi 2023
152 orang + TUKIN 48
PNS BKPSDM

12.856.233.009

Program
Kepegawaian

1.675.000.000

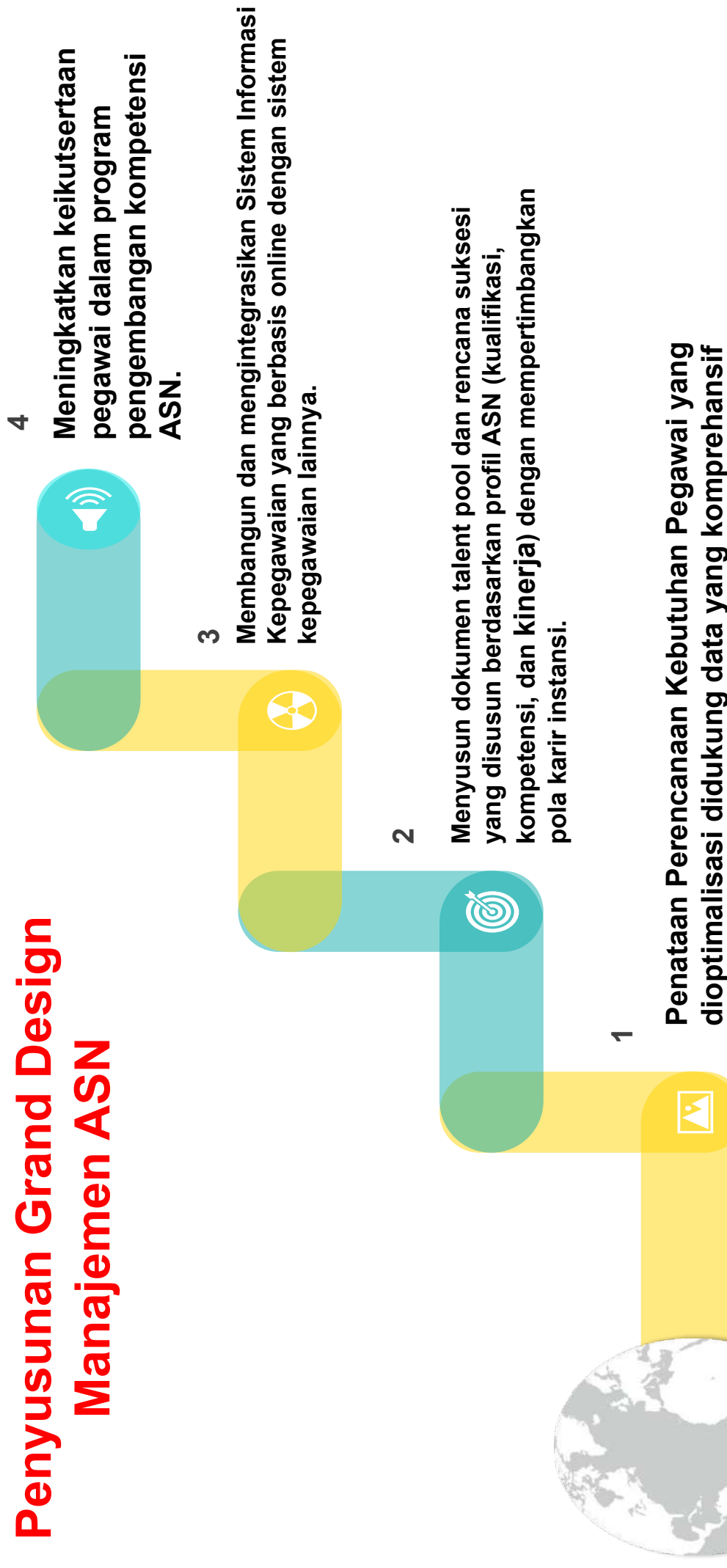
Program Pendidikan
& Pelatihan

1.736.760.000

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212 /PMK.07
/2022

ISU STRATEGIS

Penyusunan Grand Design Manajemen ASN



Indikator Kinerja Utama BKPSDM

NO	URUSAN	INDIKATOR	RUMUS	TAHUN						KET
				Perkiraan n 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
1	KEPEGAWAIAN	Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan	Jumlah PNS (JPT, Jab Administrator, Jab Fungsional) yg telah mendapatkan jabatan yang sesuai dibagi total seluruh PNS yg ada	89	90	91	92	93	94	
2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Persentase JPT, Jab Administrator, jab Pengawas yang mengikuti pelatihan struktural kepemimpinan	Jumlah JPT, Jab Administrator, jab Pengawas yang mengikuti pelatihan struktural kepemimpinan dibagi seluruh JPT, Jabatan administrator dan Jabatan Pengawas yang terisi.	68	70	72	75	77	80	

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Rp
20.000.000

6
Dokumen

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rp
11.800.000

2 Laporan

OUTPUT

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Rp 12.856.233.009

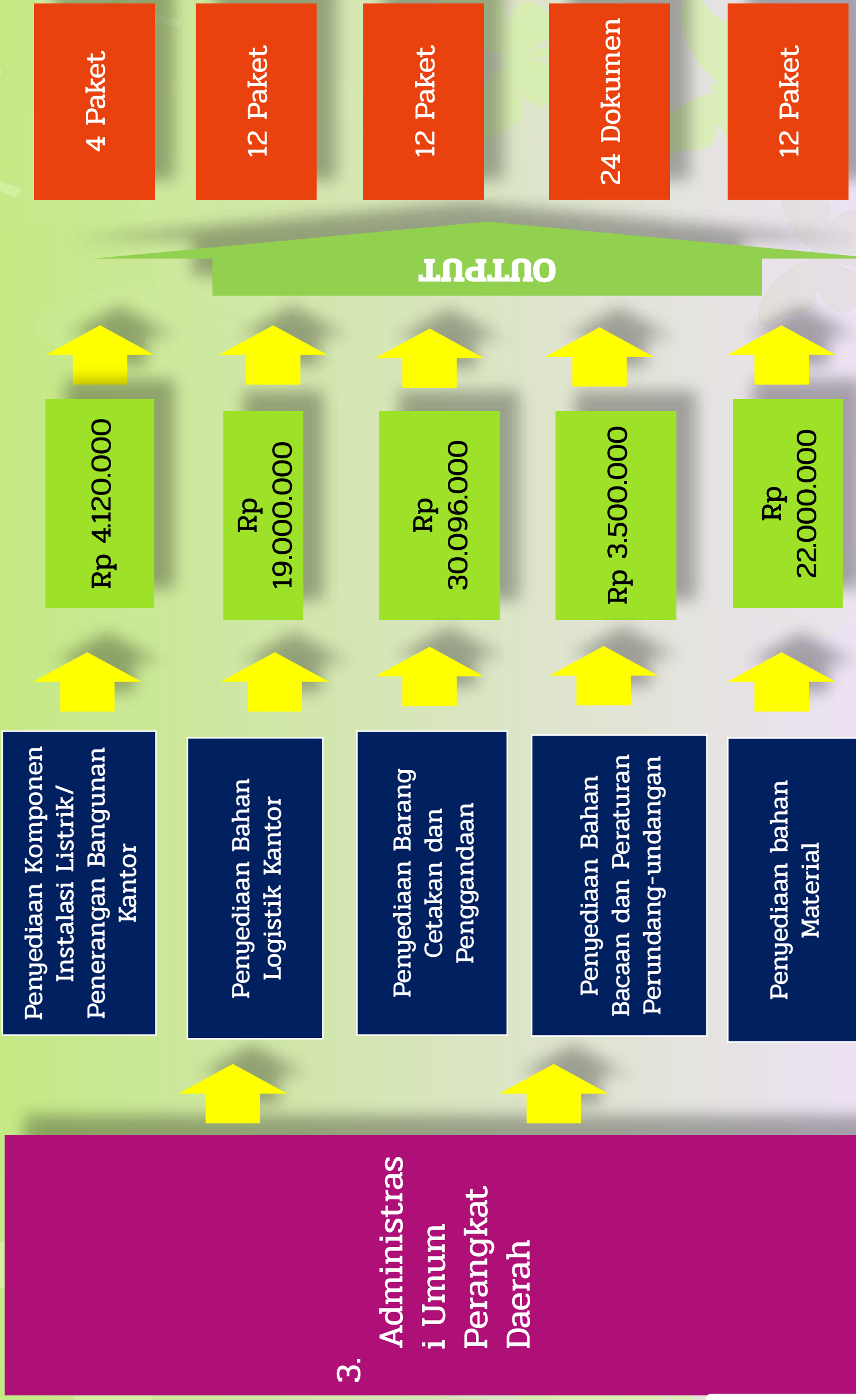
Rp 20.000.000

200 Orang

12 Dokumen

OUTPUT

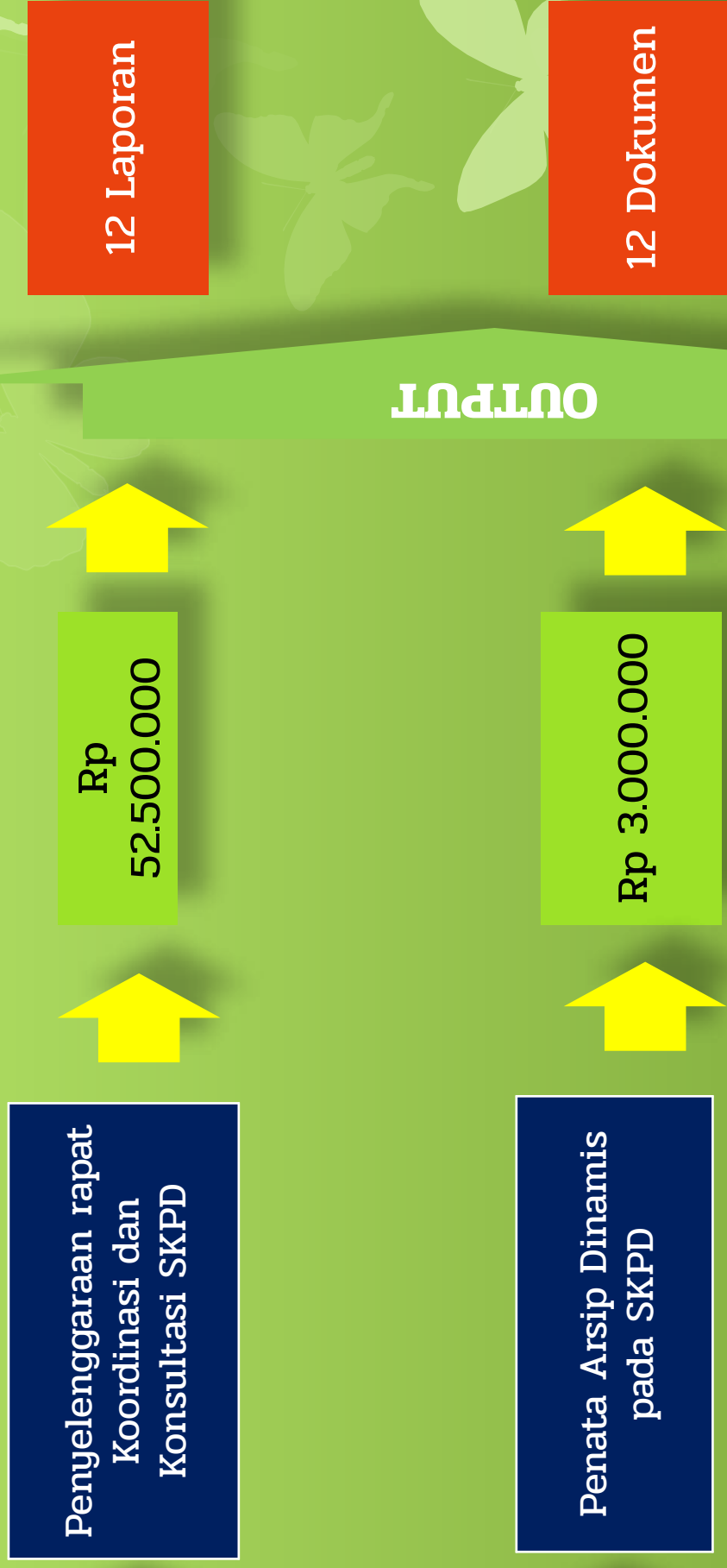
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA



3. Administراس i Umum Perangkat Daerah

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

3. Administras i Umum Perangkat Daerah



1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

4. Pengadaan
Barang
Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah



Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya



Rp
26.000.000

2 Unit



Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya



Rp
24.000.000

6 Unit

OUTPUT

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

Rp 2.000.000

12 Laporan

Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik

Rp 153.155.000

12 Bulan

Penyediaan
Jasa dan
Pelayanan
Umum Kantor

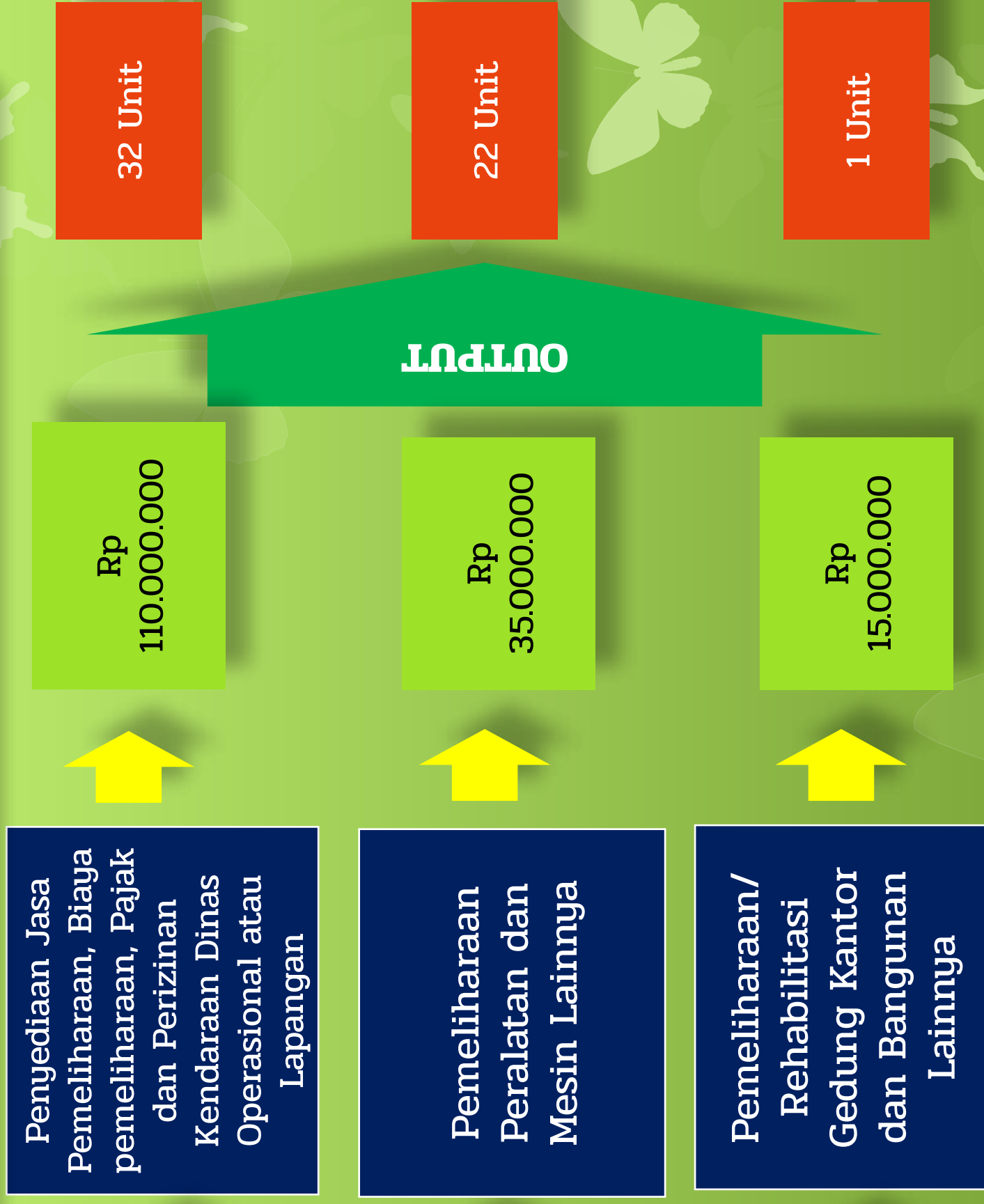
Rp
10.000.000

12 Bulan

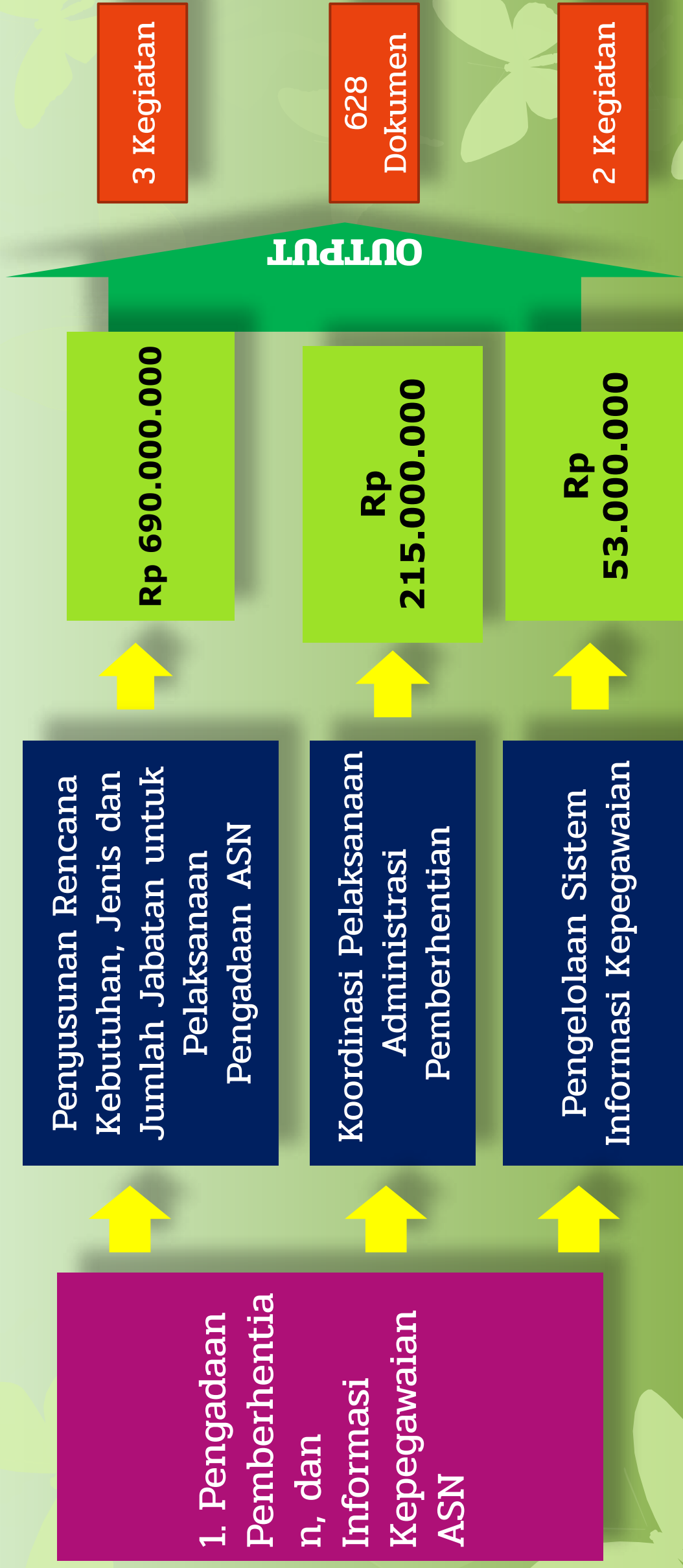
OUTPUT

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH



2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

2. Mutasi dan Promosi ASN

Pengelolaan Mutasi ASN

Rp
225.000.000

3

Dokumen

Pengelolaan Promosi ASN

Rp
300.000.000

3

Dokumen

OUTPUT

2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

3. Pengembangan Kompetensi ASN

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Rp
40.000.000

200 Orang

Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Rp
27.000.000

200 Orang

OUTPUT

2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH



4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Rp
65.000.000

Rp
60.000.000

OUTPUT

6 Dokumen

4 Laporan

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

5. Pengembangan Kompetensi Teknis

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum



Rp
300.000.000



OUTPUT

268 Orang

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

6. Sertifikasi,
Kelembagaan,
Pengembangan
Kompetensi
Manajerial dan
Fungsional

Penyusunan
Kebijakan
Teknis dan
Rencana
Sertifikasi
Kompetesiensi
Pengelolaan
Kelembagaan,
Tenaga
Pengembang
Kompetensi,
Sumber Belajar,
Kerja Sama,
Pengembangan
Kompetensi
Pimpinan
Tinggi,
Kemimpinan



Rp
1.436.760.000

OUTPUT

5 Dokumen

Thank you



**DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2024**









